



STRATEGI REKRUTMEN PESERTA DIDIK SMA DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI PAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

Fikri Ulumudin Nurhakim¹, Sitti Chadidjah², Elsabila Millaty Latiefah³

Universitas Muhammadiyah Bandung^{1,2,3}

fikrhiun01@gmail.com¹, sittihadijah2019@gmail.com², elsabilalatiefah@gmail.com³

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi rekrutmen peserta didik baru pada jenjang SMA di Kota Bandung dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dan studi kasus pada tiga jenis lembaga (SMA negeri, sekolah Islam swasta, dan madrasah), penelitian mengidentifikasi tiga model strategi dominan: model regulatif-zonasi, model seleksi mandiri berbasis nilai Islam, dan model semi tradisional adaptif. Temuan menunjukkan bahwa otonomi lembaga memungkinkan inovasi, seperti sistem PPDB daring yang meningkatkan transparansi, namun juga berpotensi memperlebar kesenjangan. Integrasi nilai-nilai PAI dalam seleksi, seperti melalui tes Baca Tulis Al-Qur'an, masih cenderung formalistik dan kognitif, belum menyentuh penilaian akhlak secara holistik. Kebijakan zonasi pemerintah menciptakan dualisme dan tantangan koordinasi, terutama bagi madrasah, yang memicu fenomena double registration. Kendala utama meliputi disparitas infrastruktur teknologi, sosialisasi yang tidak inklusif, dan intervensi politik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model rekrutmen hybrid yang menyinergikan tata kelola digital dengan nilai-nilai substantif PAI. Secara praktis, disarankan peningkatan koordinasi kebijakan, investasi infrastruktur digital, perancangan mekanisme seleksi yang lebih holistik, dan sosialisasi inklusif melalui jaringan komunitas keagamaan.

Kata Kunci: *Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Strategi Rekrutmen Peserta Didik, Studi Kasus Kota Bandung*

Abstract

This study analyzes the strategies for recruiting new students at the senior high school level in Bandung City from the perspective of Islamic Religious Education (PAI). Using a descriptive-analytical qualitative method and a case study approach across three types of institutions (public senior high schools, private Islamic schools, and madrasahs), the research identifies three dominant strategic models: the regulatory-zoning model, the independent value-based Islamic selection model, and the adaptive semi-traditional model. The findings indicate that institutional autonomy enables innovation, such as an online New Student Admission (PPDB) system that enhances transparency, but also potentially widens disparities. The integration of PAI values in the selection process, for instance through Al-Qur'an Reading and Writing tests, remains predominantly formalistic and cognitive, not yet holistically addressing character assessment. Government zoning policy creates dualism and coordination challenges, especially for madrasahs, triggering a phenomenon of double registration. Key obstacles include technological infrastructure disparities, non-inclusive socialization, and political intervention. This research contributes to the development of a hybrid recruitment model that synergizes digital governance with the substantive values of PAI. Practically, it recommends enhanced policy coordination, investment in digital infrastructure, the design of more holistic selection mechanisms, and inclusive socialization through religious community networks.

Keywords: *New Student Admission (PPDB) Management, Student Recruitment Strategy, Case Study of Bandung City*

PENDAHULUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan gerbang strategis dalam ekosistem pendidikan yang tidak hanya menentukan keberlangsungan operasional sekolah, tetapi juga secara signifikan memengaruhi kualitas dan identitas lembaga. Proses ini berperan sebagai mekanisme seleksi awal untuk memperoleh input (calon peserta didik) yang selaras dengan visi, misi, dan kapasitas sekolah, yang pada gilirannya menjadi fondasi bagi pencapaian proses pembelajaran yang efektif serta output lulusan yang bermutu (Prihatin, 2011). Dalam konteks yang lebih luas, PPDB yang dikelola dengan baik merupakan manifestasi dari pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Di Kota Bandung, mekanisme PPDB didominasi oleh penerapan kebijakan sistem zonasi yang diamanatkan pemerintah pusat dan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota. Kajian evaluatif oleh (Khodijah, 2025) mengungkap bahwa meski bertujuan mulia untuk pemerataan akses dan penghapusan stigma "sekolah favorit", implementasi kebijakan ini di Kota Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks. Permasalahan mendasar muncul dari ketidakseimbangan antara distribusi geografis penduduk usia sekolah dengan ketersediaan serta distribusi daya tampung sekolah negeri, khususnya di wilayah padat seperti Kecamatan Sukajadi. Disparitas ini berpotensi memicu ketimpangan akses baru, di mana calon peserta didik di zona dengan jumlah sekolah terbatas memiliki peluang yang lebih kecil (Khodijah, 2025). Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme zonasi yang masih rendah serta kerentanan manipulasi data (seperti pemalsuan dokumen domisili) turut mengaburkan transparansi dan meritokrasi dalam proses seleksi.

Menjawab kompleksitas administrasi dan tuntutan transparansi, sejumlah lembaga pendidikan mulai mengadopsi teknologi digital dalam proses PPDB. Penelitian pada MAN 2 Kota Bandung mendemonstrasikan bagaimana implementasi PPDB berbasis website dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi calon peserta didik (Permana dkk, 2025). Sistem online tersebut tidak hanya memangkas biaya operasional dan waktu, tetapi juga membangun platform yang lebih terbuka dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi potensi kecurangan administratif. Temuan ini menyiratkan bahwa integrasi teknologi merupakan solusi prospektif untuk mengatasi beberapa kelemahan prosedural dalam sistem PPDB konvensional, termasuk zonasi. Terlepas dari kerangka kebijakan (zonasi) dan instrumentasi teknologi, esensi keberhasilan PPDB terletak pada manajemen rekrutmen peserta didik yang terstruktur dan sistematis. Sebagaimana diilustrasikan dalam konteks SMP Darul Falah, manajemen rekrutmen yang matang meliputi perencanaan kebutuhan, penyusunan kriteria seleksi yang objektif, pembentukan panitia, pelaksanaan tahapan seleksi (administratif, tes akademik, wawancara), hingga pengumuman hasil sangat krusial untuk memperoleh calon peserta didik yang tidak hanya memenuhi kuota, tetapi juga sesuai dengan karakter dan tujuan pengembangan lembaga (Widya, 2020). Tanpa manajemen yang baik, sekolah berisiko menerima input yang tidak berkualitas yang dapat berdampak pada proses pembelajaran dan mutu lulusan.

Setiap proses rekrutmen juga tidak lepas dari paparan berbagai risiko operasional dan strategis. Penelitian di Kidsville School Bandung mengidentifikasi sejumlah risiko dalam rekrutmen, seperti jumlah pendaftar di bawah atau melebihi kuota, serta pendaftaran di luar waktu yang telah ditetapkan (Azzahra et al, 2024). Risiko-risiko semacam ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu perencanaan akademik, pembiayaan, dan kestabilan operasional sekolah. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang proaktif dan fleksibel, seperti kampanye pemasaran yang agresif, penambahan kapasitas kelas, atau sistem *waiting list*, untuk memastikan keberlangsungan proses pendidikan tetap optimal.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI), proses rekrutmen peserta didik tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif-belaka, tetapi juga sebagai amanah dan praktik ibadah yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Nilai keadilan (*'adl*) menuntut proses seleksi yang objektif dan tidak diskriminatif. Kejujuran (*shiddiq*) dan amanah harus menjadi dasar dalam pengelolaan data dan informasi. Sementara musyawarah (*syura*) dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan dan penyelesaian masalah terkait PPDB, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti komite sekolah dan perwakilan masyarakat. Mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam setiap tahapan

rekrutmen diharapkan dapat menciptakan proses PPDB yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga bermakna secara etis dan spiritual, serta melahirkan calon peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berakhlakul karimah. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berfokus untuk menganalisis strategi rekrutmen peserta didik baru pada jenjang SMA di Kota Bandung dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. Analisis akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip manajemen rekrutmen yang terstruktur, pemanfaatan teknologi, mitigasi risiko, dan integrasi nilai-nilai Islami (keadilan, kejujuran, amanah, musyawarah) dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan proses PPDB, khususnya dalam merespons dinamika dan tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan sistem zonasi. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran baik secara praktis maupun konseptual bagi pengembangan sistem rekrutmen peserta didik yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis, mensintesis, dan mengkonstruksi pemahaman teoritis serta konseptual berdasarkan literatur dan dokumen ilmiah yang telah ada mengenai strategi rekrutmen peserta didik baru, khususnya dalam konteks kebijakan zonasi Kota Bandung dan perspektif Pendidikan Agama Islam (M. Nazir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kualitatif di Kota Bandung ini membuktikan bahwa proses rekrutmen siswa SMA berlangsung dalam tiga model yang khas. Model pertama adalah model regulatif zonasi, sebagaimana tampak di SMA Negeri 12 Bandung. Sekolah negeri ini sepenuhnya mengacu pada kuota Permendikbud 44/2019 dan Perwal Kota Bandung No.57/2021, dengan verifikasi dokumen secara daring. Dalam konteks kebijakan nasional, zonasi bertujuan pemeratakan akses pendidikan. Namun, dalam praktiknya banyak orang tua menilai sistem zonasi “memperumit” karena hanya memprioritaskan jarak domisili. Temuan lapangan menegaskan bahwa sekolah negeri berjalan secara struktural dan terukur sesuai pedoman resmi sehingga pelaksanaannya “terstruktur dan akuntabel”. Sebagai konsekuensinya, otonomi sekolah negeri dalam inovasi rekrutmen relatif terbatas, karena harus tunduk pada instruksi vertikal. Dalam kerangka *Manajemen Berbasis Sekolah* (MBS) teoretis, hal ini menggambarkan dilema otonomi: menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab formal dapat menjamin ekuitas, tetapi berisiko menghambat kreativitas sekolah. Peneliti mencatat bahwa lemahnya keterlibatan komunitas dan pengawasan publik di tahap evaluasi juga menjadi penghambat (“community participation stage need improvement”). Dengan demikian, keberhasilan zonasi bergantung pada kesinambungan sosialisasi dan keterlibatan publik, sesuai pengamatan bahwa Kota Bandung perlu fokus pada sosialisasi PPDB berkelanjutan pada 2025 (Khodijah, 2025).

Model kedua adalah seleksi mandiri berbasis nilai yang diterapkan oleh sekolah Islam, yaitu SMA Muhammadiyah 2 Bandung dan MAN 2 Kota Bandung. Kedua lembaga ini memanfaatkan otonominya untuk menerapkan seleksi ketat dengan beragam instrumen: uji akademik *Computer Based Test* (CBT), tes baca-tulis Al-Qur’an, wawancara keagamaan, dan portofolio. Pendekatan ini mencerminkan paradigma bahwa sekolah Islam ingin menyaring siswa yang “selaras dengan visi keislaman” lembaga. Dalam praktiknya, seperti di MAN 2 Bandung, PPDB online dinilai telah memenuhi standar inklusif: indikator seperti daya tampung, kriteria calon siswa, serta prosedur yang objektif, transparan, dan akuntabel telah dipenuhi. Misalnya melaporkan bahwa “*sistem PPDB MAN 2 Kota Bandung sudah sesuai dengan standar, dengan penerapan sistem yang objektif, transparan, dan akuntabel*” (Andi, 2025). Fakta ini menunjukkan integrasi teknologi digital dalam PPDB memberikan *transparency* (dimensi akuntabilitas Koppell) dengan lebih baik. Namun demikian, implementasi tes keislaman masih fokus pada aspek kognitif (“formalistik dan hafalan”) saja, belum mengukur sikap atau akhlak. Dari perspektif *tarbiyah* (pendidikan karakter Islam), ini

memperlihatkan ketimpangan: penekanan hafalan dan BTQ adalah kontrol mutu “input” peserta didik, tetapi pendidikan Islam idealnya berorientasi holistik. Oleh karena itu, meski inovasi seleksi di sekolah Islam menguatkan karakter religius peserta didik, peneliti menyoroti kebutuhan memperluas instrumen seleksi agar mencakup penilaian sikap, nilai, dan potensi kepemimpinan sesuai tujuan PAI “membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia”. Dengan kata lain, strategi ini menguatkan teori pendidikan Islam bahwa pembentukan karakter (akhlak) tidak boleh terpisah dari proses seleksi dan pembelajaran.

Model ketiga adalah model semi-tradisional adaptif, ditemui pada sebuah Madrasah Aliyah Negeri lainnya di Bandung. Madrasah ini menggabungkan pendaftaran online dengan verifikasi dan tes berbasis offline. Pola ini mencerminkan transisi teknologi di lingkungan yang masih konservatif: pihak madrasah mulai menerapkan sistem daring, namun proses pemeriksaan berkas dan pengujian tetap manual. Perbedaan kapasitas adaptasi teknologi ini menyebabkan variasi akuntabilitas: MAN 2 Bandung memiliki *dashboard* real-time untuk pengawasan, sedangkan madrasah lainnya masih mengandalkan rapat koordinasi dan pemeriksaan manual yang rawan human error. Secara konseptual, temuan ini konsisten dengan dimensi akuntabilitas Koppell, di mana penggunaan sistem elektronik meningkatkan dimensi transparansi dan kontrol (*controllability*) (Andi, 2025). Sebaliknya, aspek responsiveness (tanggap terhadap keluhan masyarakat) masih lemah di semua sekolah, menandakan perlunya kebijakan pengaduan yang lebih responsif. Peneliti mengamati bahwa kolaborasi lintas-institusi, seperti koordinasi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, penting untuk menyelaraskan standar, terutama dalam pengaturan jalur afirmasi.

Selain ketiga pola di atas, penelitian ini juga mengungkap paradoks administrasi di lapangan. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama, madrasah negeri dan sekolah Islam swasta memiliki otonomi lebih besar terhadap kebijakan zonasi Kemendikbud. Artinya, zonasi tidak selalu diterapkan kaku; pihak sekolah hanya mempertimbangkan jarak untuk jalur afirmasi. Akibatnya, fenomena double registration muncul calon siswa mendaftar sekaligus ke sekolah zonasi (SMA negeri) dan sekolah Islam favorit. Kondisi ini menambah beban administrasi dan membingungkan orang tua. Selain itu, tekanan eksternal dan intervensi politik pun menjadi tantangan. Sebagaimana dikabarkan secara nasional, komitmen gubernur maupun pejabat pendidikan menegaskan agar PPDB bebas intervensi dan pungutan liar, tetapi realitasnya politisasi *jalur khusus* sering memicu kontroversi fenomena ini konsisten dengan temuan yang menyoroti ancaman intervensi politik (Gusdanie et al, 2025). Meskipun tidak ada kutipan riset spesifik Bandung tentang ini, hasil wawancara menunjukkan adanya tekanan dari pihak luar yang berupaya mendapatkan jalur tertentu, yang tentu harus diwaspadai agar integritas seleksi terjaga.

Dari sisi teknis, kendala utama adalah ketidakmerataan infrastruktur digital dan sosialisasi. Sekolah dengan sumberdaya memadai dapat mengadopsi PPDB online lebih cepat, sebaliknya sekolah lain tertatih oleh jaringan internet dan sumberdaya SDM. Hal ini diperkuat oleh analisis implementasi PPDB di Bandung yang mencatat beberapa sekolah masih kesulitan infrastruktur teknologi (Khodijah, 2025). Selain itu, sosialisasi PPDB yang belum inklusif membuat masyarakat kalangan ekonomi bawah minim informasi, sehingga partisipasi mereka menjadi terbatas. Temuan serupa di tingkat provinsi menggarisbawahi bahwa PPDB top-down tanpa pemberdayaan aktor lokal cenderung melibatkan masyarakat hanya secara administratif. Dalam studi juga dinyatakan bahwa “pendekatan top-down dan lemahnya koordinasi antarlembaga menghambat verifikasi data dan keadilan jalur afirmasi”. Dengan kata lain, tanpa sinergi antar-aktor dan adaptasi kontekstual, kebijakan pendidikan tidak akan optimal (Pangestu et al, 2025).

Secara teoretis, temuan ini memperkuat prinsip *Manajemen Berbasis Sekolah* (MBS) bahwa otonomi sekolah memberi ruang inovasi, namun juga berpotensi menciptakan disparitas jika tidak diimbangi pengawasan yang memadai. Dalam praktik PPDB Bandung, otonomi menyediakan kebebasan bagi sekolah Islam menerapkan seleksi kreatif, sedangkan sekolah negeri lebih terikat regulasi. Hal ini paralel dengan Pengelolaan kebijakan yang disinggung Hill & Hupe dalam penelitian serupa, bahwa keseimbangan antara kontrol birokratis dan otonomi lokal adalah kunci keberhasilan (Sidik et al, 2025). Dari sudut pandang akuntabilitas, implementasi sistem digital di MAN 2 dapat

dilihat sebagai peningkatan dimensi transparansi dan kendali (kontrol), sesuai teori Koppell (2005) yang menyatakan bahwa organisasi akuntabel memiliki mekanisme pelaporan dan monitoring yang jelas (Kennywan,2023). Namun, dimensi tanggap-layan (responsiveness) masih perlu perhatian, misalnya dengan memperkuat saluran pengaduan yang ramah masyarakat. Dalam konteks keilmuan Pendidikan Agama Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dalam proses rekrutmen belum sepenuhnya holistik. PAI dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, dan keimanan secara utuh (Salisa, 2024). Temuan kami bahwa seleksi lebih menekankan ujian hafalan Al-Qur'an dan BTQ mencerminkan fokus kognitif semata, belum sejalan dengan tujuan PAI membentuk pribadi "*beriman, bertakwa, berakhlak mulia*". Oleh karena itu, penting agar ke depan lembaga pendidikan Islam mengembangkan instrumen seleksi yang juga mengukur sikap, jiwa sosial, dan kepemimpinan Islami siswa. Membandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil kami konsisten dengan penelitian yang menemukan efektivitas sistem PPDB digital dalam mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas, namun juga selaras dengan temuan Purwanti et al. (2019) bahwa dampak digitalisasi PPDB dapat bersifat tidak merata di masyarakat.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah pengembangan model rekrutmen *hybrid* yang mengintegrasikan tata kelola digital dengan nilai-nilai substantif Pendidikan Agama Islam. Secara praktis, beberapa rekomendasi muncul. Bagi pemerintah (Pemda dan Kemenag), diperlukan penyesuaian kebijakan zonasi dan afirmasi yang menghormati otonomi madrasah namun menghindari duplikasi administrasi. Bagi penyelenggara sekolah Islam, investasi pemerataan infrastruktur digital perlu diintensifkan, dan mekanisme seleksi harus didesain lebih holistik. Sosialisasi PPDB hendaknya melibatkan jaringan komunitas keagamaan untuk menjangkau keluarga marginal. Sekolah negeri, pada gilirannya, perlu memperkuat sosialisasi zonasi agar pemahaman orang tua lebih baik. Akhirnya, peningkatan tata kelola akuntabilitas internal (misalnya dengan dashboard publik) dapat memperkecil kesalahan manusia. Penelitian ini memiliki keterbatasan: sampel hanya di Kota Bandung dan tidak mengukur dampak jangka panjang seleksi. Kedalaman wawancara orang tua pun terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan bersifat komparatif antar-regional, longitudinal untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pasca-rekrutmen, serta eksplorasi kebijakan dan dinamika politik-ekonomi yang memengaruhi proses rekrutmen di lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan analisis data, dapat diidentifikasi tiga pola strategi rekrutmen yang dominan. Pertama, model regulatif-zonasi di SMA Negeri 12 Bandung yang sepenuhnya tunduk pada kuota Permendikbud dan Perwal Kota, dengan seleksi berbasis verifikasi dokumen secara daring. Kedua, model seleksi mandiri berbasis nilai yang dijalankan SMA Muhammadiyah 2 dan MAN 2 Kota Bandung. Pada intinya, kedua lembaga ini memanfaatkan otonominya untuk menerapkan seleksi ketat yang mengintegrasikan tes akademik (CBT), tes baca tulis Al-Qur'an (BTQ), wawancara keagamaan, dan penilaian portofolio, guna menjaring calon peserta didik yang selaras dengan visi keislaman. Ketiga, model semi-tradisional adaptif pada MAN lainnya, yang menggabungkan pendaftaran online dengan proses verifikasi dan tes yang masih dominan luring, yang pada gilirannya menunjukkan variasi kapasitas adaptasi teknologi di lingkungan madrasah. Lebih jauh, temuan lain mengungkap bahwa integrasi nilai Islam dalam seleksi masih cenderung formalistik dan kognitif (menekankan hafalan dan BTQ), belum menyentuh penilaian sikap dan akhlak secara holistik. Di sisi kebijakan, perlu dicatat bahwa sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama, MAN dan sekolah Islam swasta memiliki otonomi lebih besar terhadap kebijakan zonasi Kemendikbud. Mereka tidak menerapkannya secara kaku, namun mempertimbangkan jarak untuk jalur afirmasi. Kondisi paradoks ini menciptakan fenomena *double registration* di mana calon siswa mendaftar ke sekolah zonasi dan sekolah Islam secara bersamaan, meningkatkan kompleksitas administratif. Dari segi akuntabilitas, terdapat kesenjangan antara MAN 2 yang menggunakan dashboard real-time untuk transparansi, dengan MAN lainnya dan SMA Muhammadiyah yang masih mengandalkan rapat koordinasi dan pemeriksaan manual yang rentan human error. Tidak mengherankan, kendala utama yang dihadapi meliputi disparitas infrastruktur teknologi, sosialisasi yang belum inklusif bagi masyarakat ekonomi

bawah, serta tekanan eksternal dan intervensi politik untuk "jalur khusus" yang mengancam integritas proses.

Dalam pembahasan, dapat dikemukakan bahwa temuan penelitian ini memperkuat penerapan Teori Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di mana otonomi memungkinkan inovasi namun juga berpotensi menciptakan kesenjangan. Secara spesifik, penerapan teknologi digital di MAN 2 juga sejalan dengan dimensi akuntabilitas (Koppell, 2005), khususnya dalam meningkatkan *transparency* dan *controllability*, meski dimensi *responsiveness* terhadap keluhan masyarakat masih perlu ditingkatkan di semua jenis sekolah. Dari perspektif Pendidikan Agama Islam, patut disadari bahwa penekanan pada tes BTQ dan tahfidz merupakan upaya *quality control input*, namun pendekatan ini perlu dikembangkan agar lebih holistik dan tidak hanya menilai aspek kognitif semata, sesuai dengan konsep *tarbiyah* yang menekankan pembentukan akhlak. Dalam konteks akademik yang lebih luas, dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini mengonfirmasi efektivitas sistem digital (Permana dkk., 2025) sekaligus mengungkap dampak sosialnya yang tidak merata (Purwanti dkk., 2019), serta memperkuat adanya kompleksitas koordinasi kelembagaan (Panji Pangetu dkk., 2025) dan ancaman intervensi politik (Gusdianie & Mulyadi, 2025) dalam proses rekrutmen.

Dari temuan tersebut, implikasi teoretis dari penelitian ini adalah kontribusinya pada pengembangan m Penelitian kualitatif di Kota Bandung ini membuktikan bahwa proses rekrutmen siswa SMA berlangsung dalam tiga model yang khas. Model pertama adalah model regulatif zonasi, sebagaimana tampak di SMA Negeri 12 Bandung. Sekolah negeri ini sepenuhnya mengacu pada kuota Permendikbud 44/2019 dan Perwal Kota Bandung No.57/2021, dengan verifikasi dokumen secara daring. Dalam konteks kebijakan nasional, zonasi bertujuan pemeratakan akses pendidikan. Namun, dalam praktiknya banyak orang tua menilai sistem zonasi "memperumit" karena hanya memprioritaskan jarak domisili. Temuan lapangan menegaskan bahwa sekolah negeri berjalan secara struktural dan terukur sesuai pedoman resmi sehingga pelaksanaannya "terstruktur dan akuntabel". Sebagai konsekuensinya, otonomi sekolah negeri dalam inovasi rekrutmen relatif terbatas, karena harus tunduk pada instruksi vertikal. Dalam kerangka *Manajemen Berbasis Sekolah* (MBS) teoretis, hal ini menggambarkan dilema otonomi: menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab formal dapat menjamin ekuitas, tetapi berisiko menghambat kreativitas sekolah. Peneliti mencatat bahwa lemahnya keterlibatan komunitas dan pengawasan publik di tahap evaluasi juga menjadi penghambat ("community participation stage need improvement"). Dengan demikian, keberhasilan zonasi bergantung pada kesinambungan sosialisasi dan keterlibatan publik, sesuai pengamatan bahwa Kota Bandung perlu fokus pada sosialisasi PPDB berkelanjutan pada 2025 (Khodijah, 2025).

Model kedua adalah seleksi mandiri berbasis nilai yang diterapkan oleh sekolah Islam, yaitu SMA Muhammadiyah 2 Bandung dan MAN 2 Kota Bandung. Kedua lembaga ini memanfaatkan otonominya untuk menerapkan seleksi ketat dengan beragam instrumen: uji akademik *Computer Based Test* (CBT), tes baca-tulis Al-Qur'an, wawancara keagamaan, dan portofolio. Pendekatan ini mencerminkan paradigma bahwa sekolah Islam ingin menyaring siswa yang "selaras dengan visi keislaman" lembaga. Dalam praktiknya, seperti di MAN 2 Bandung, PPDB online dinilai telah memenuhi standar inklusif: indikator seperti daya tampung, kriteria calon siswa, serta prosedur yang objektif, transparan, dan akuntabel telah dipenuhi. Misalnya melaporkan bahwa "*sistem PPDB MAN 2 Kota Bandung sudah sesuai dengan standar, dengan penerapan sistem yang objektif, transparan, dan akuntabel*" (Andi, 2025). Fakta ini menunjukkan integrasi teknologi digital dalam PPDB memberikan *transparency* (dimensi akuntabilitas Koppell) dengan lebih baik. Namun demikian, implementasi tes keislaman masih fokus pada aspek kognitif ("formalistik dan hafalan") saja, belum mengukur sikap atau akhlak. Dari perspektif *tarbiyah* (pendidikan karakter Islam), ini memperlihatkan ketimpangan: penekanan hafalan dan BTQ adalah kontrol mutu "input" peserta didik, tetapi pendidikan Islam idealnya berorientasi holistik. Oleh karena itu, meski inovasi seleksi di sekolah Islam menguatkan karakter religius peserta didik, peneliti menyoroti kebutuhan memperluas instrumen seleksi agar mencakup penilaian sikap, nilai, dan potensi kepemimpinan sesuai tujuan PAI "membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia". Dengan kata lain, strategi ini

menguatkan teori pendidikan Islam bahwa pembentukan karakter (akhlak) tidak boleh terpisah dari proses seleksi dan pembelajaran.

Model ketiga adalah model semi-tradisional adaptif, ditemui pada sebuah Madrasah Aliyah Negeri lainnya di Bandung. Madrasah ini menggabungkan pendaftaran online dengan verifikasi dan tes berbasis offline. Pola ini mencerminkan transisi teknologi di lingkungan yang masih konservatif: pihak madrasah mulai menerapkan sistem daring, namun proses pemeriksaan berkas dan pengujian tetap manual. Perbedaan kapasitas adaptasi teknologi ini menyebabkan variasi akuntabilitas: MAN 2 Bandung memiliki *dashboard* real-time untuk pengawasan, sedangkan madrasah lainnya masih mengandalkan rapat koordinasi dan pemeriksaan manual yang rawan human error. Secara konseptual, temuan ini konsisten dengan dimensi akuntabilitas Koppell, di mana penggunaan sistem elektronik meningkatkan dimensi transparansi dan kontrol (*controllability*) (Andi, 2025). Sebaliknya, aspek responsiveness (tanggap terhadap keluhan masyarakat) masih lemah di semua sekolah, menandakan perlunya kebijakan pengaduan yang lebih responsif. Peneliti mengamati bahwa kolaborasi lintas-institusi, seperti koordinasi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, penting untuk menyelaraskan standar, terutama dalam pengaturan jalur afirmasi.

Selain ketiga pola di atas, penelitian ini juga mengungkap paradoks administrasi di lapangan. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama, madrasah negeri dan sekolah Islam swasta memiliki otonomi lebih besar terhadap kebijakan zonasi Kemendikbud. Artinya, zonasi tidak selalu diterapkan kaku; pihak sekolah hanya mempertimbangkan jarak untuk jalur afirmasi. Akibatnya, fenomena double registration muncul calon siswa mendaftar sekaligus ke sekolah zonasi (SMA negeri) dan sekolah Islam favorit. Kondisi ini menambah beban administrasi dan membingungkan orang tua. Selain itu, tekanan eksternal dan intervensi politik pun menjadi tantangan. Sebagaimana dikabarkan secara nasional, komitmen gubernur maupun pejabat pendidikan menegaskan agar PPDB bebas intervensi dan pungutan liar, tetapi realitasnya politisasi *jalur khusus* sering memicu kontroversi (fenomena ini konsisten dengan temuan Gusdanie & Mulyadi, 2025 yang menyoroti ancaman intervensi politik). Meskipun tidak ada kutipan riset spesifik Bandung tentang ini, hasil wawancara menunjukkan adanya tekanan dari pihak luar yang berupaya mendapatkan jalur tertentu, yang tentu harus diwaspadai agar integritas seleksi terjaga.

Dari sisi teknis, kendala utama adalah ketidakmerataan infrastruktur digital dan sosialisasi. Sekolah dengan sumberdaya memadai dapat mengadopsi PPDB online lebih cepat, sebaliknya sekolah lain tertatih oleh jaringan internet dan sumberdaya SDM. Hal ini diperkuat oleh analisis implementasi PPDB di Bandung yang mencatat beberapa sekolah masih kesulitan infrastruktur teknologi (Khodijah, 2025). Selain itu, sosialisasi PPDB yang belum inklusif membuat masyarakat kalangan ekonomi bawah minim informasi, sehingga partisipasi mereka menjadi terbatas. Temuan serupa di tingkat provinsi menggarisbawahi bahwa PPDB top-down tanpa pemberdayaan aktor lokal cenderung melibatkan masyarakat hanya secara administratif. Dalam studi (Pangestu et al, 2025) juga dinyatakan bahwa "*pendekatan top-down dan lemahnya koordinasi antarlembaga menghambat verifikasi data dan keadilan jalur afirmasi*". Dengan kata lain, tanpa sinergi antar-aktor dan adaptasi kontekstual, kebijakan pendidikan tidak akan optimal.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat prinsip *Manajemen Berbasis Sekolah* (MBS) bahwa otonomi sekolah memberi ruang inovasi, namun juga berpotensi menciptakan disparitas jika tidak diimbangi pengawasan yang memadai. Dalam praktik PPDB Bandung, otonomi menyediakan kebebasan bagi sekolah Islam menerapkan seleksi kreatif, sedangkan sekolah negeri lebih terikat regulasi. Hal ini paralel dengan Pengelolaan kebijakan yang disinggung Hill & Hupe (2002) dalam penelitian serupa, bahwa keseimbangan antara kontrol birokratis dan otonomi lokal adalah kunci keberhasilan (Sidik et al, 2025). Dari sudut pandang akuntabilitas, implementasi sistem digital di MAN 2 dapat dilihat sebagai peningkatan dimensi transparansi dan kendali (kontrol), sesuai teori Koppell (2005) yang menyatakan bahwa organisasi akuntabel memiliki mekanisme pelaporan dan monitoring yang jelas (Kennywan, 2023). Namun, dimensi tanggap-layan (responsiveness) masih perlu perhatian, misalnya dengan memperkuat saluran pengaduan yang ramah masyarakat. Dalam konteks keilmuan Pendidikan Agama Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam

dalam proses rekrutmen belum sepenuhnya holistik. Temuan kami bahwa seleksi lebih menekankan ujian hafalan Al-Qur'an dan BTQ mencerminkan fokus kognitif semata, belum sejalan dengan tujuan PAI membentuk pribadi "*beriman, bertakwa, berakhlak mulia*". Oleh karena itu, penting agar ke depan lembaga pendidikan Islam mengembangkan instrumen seleksi yang juga mengukur sikap, jiwa sosial, dan kepemimpinan Islami siswa. Membandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil kami konsisten dengan penelitian (Permana, 2025) yang menemukan efektivitas sistem PPDB digital dalam mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas, namun juga selaras dengan temuan bahwa dampak digitalisasi PPDB dapat bersifat tidak merata di masyarakat (Purwanti et al. 2019).

Implikasi teoretis penelitian ini adalah pengembangan model rekrutmen *hybrid* yang mengintegrasikan tata kelola digital dengan nilai-nilai substantif Pendidikan Agama Islam. Secara praktis, beberapa rekomendasi muncul. Bagi pemerintah (Pemda dan Kemenag), diperlukan penyesuaian kebijakan zonasi dan afirmasi yang menghormati otonomi madrasah namun menghindari duplikasi administrasi. Bagi penyelenggara sekolah Islam, investasi pemerataan infrastruktur digital perlu diintensifkan, dan mekanisme seleksi harus didesain lebih holistik. Sosialisasi PPDB hendaknya melibatkan jaringan komunitas keagamaan untuk menjangkau keluarga marginal. Sekolah negeri, pada gilirannya, perlu memperkuat sosialisasi zonasi agar pemahaman orang tua lebih baik. Akhirnya, peningkatan tata kelola akuntabilitas internal (misalnya dengan dashboard publik) dapat memperkecil kesalahan manusia. Penelitian ini memiliki keterbatasan: sampel hanya di Kota Bandung dan tidak mengukur dampak jangka panjang seleksi. Kedalaman wawancara orang tua pun terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan bersifat komparatif antar-regional, longitudinal untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pasca-rekrutmen, serta eksplorasi kebijakan dan dinamika politik-ekonomi yang memengaruhi proses rekrutmen di lembaga pendidikan Islam.

Model rekrutmen *hybrid* yang mengintegrasikan digital governance dengan nilai-nilai substantif Pendidikan Agama Islam. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini menyarankan beberapa hal. Bagi pemerintah dan Kemenag, diperlukan penyesuaian kebijakan dan panduan yang menghormati otonomi madrasah sekaligus mencegah tumpang tindih administratif. Bagi penyelenggara Pendidikan Islam, sangat penting untuk berinvestasi dalam pemerataan infrastruktur digital, merancang mekanisme seleksi yang lebih holistik, melakukan sosialisasi melalui jaringan komunitas keagamaan, dan memperkuat sistem pengaduan. Bagi sekolah negeri, peningkatan sosialisasi kebijakan zonasi sangat diperlukan. Akhirnya, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan sampel yang hanya di Kota Bandung, fokus pada proses tanpa mengukur dampak jangka panjang, serta perspektif orang tua yang terbatas. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif-regional yang lebih luas, penelitian longitudinal untuk mengkaji dampak rekrutmen terhadap hasil belajar, pengembangan instrumen penilaian karakter keislaman yang terdigitalisasi, serta eksplorasi mendalam mengenai dinamika politik dan ekonomi yang memengaruhi kebijakan rekrutmen di lembaga pendidikan Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa strategi rekrutmen peserta didik baru pada jenjang SMA di Kota Bandung dalam perspektif Pendidikan Agama Islam menampilkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh interaksi antara regulasi pemerintah, otonomi kelembagaan, kapasitas teknologi, dan integrasi nilai-nilai keislaman. Penelitian ini mengidentifikasi tiga model strategi dominan yang merefleksikan spektrum respons lembaga pendidikan: model regulatif-zonasi (SMA Negeri), model seleksi mandiri berbasis nilai (Sekolah Islam/Madrasah), dan model semi-tradisional adaptif (Madrasah dengan sumber daya terbatas). Otonomi yang dimiliki sekolah dan madrasah berbasis Islam memungkinkan pengembangan inovasi, seperti sistem PPDB daring terintegrasi, yang sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dan mampu meningkatkan dimensi transparansi serta akuntabilitas. Namun, otonomi ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas dan akses antarlembaga.

Integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam proses rekrutmen, meski telah diwujudkan melalui komponen seperti tes Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) dan wawancara keagamaan, masih cenderung bersifat formalistik dan menitikberatkan aspek kognitif. Pendekatan ini belum sepenuhnya mencapai esensi holistik dari *tarbiyah* Islamiyah yang menekankan pembentukan akhlak dan karakter (*akhlaqul karimah*). Di sisi lain, kebijakan zonasi pemerintah menciptakan dualisme dan tantangan koordinasi, khususnya bagi madrasah di bawah Kementerian Agama, yang memunculkan fenomena *double registration* dan kompleksitas administratif. Kendala utama seperti disparitas infrastruktur teknologi, sosialisasi yang tidak inklusif, serta intervensi politik eksternal, tetap menjadi penghambat signifikan bagi terwujudnya proses rekrutmen yang benar-benar adil, transparan, dan berintegritas. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model rekrutmen hybrid yang menyinergikan prinsip *digital governance* dengan nilai-nilai substantif Pendidikan Agama Islam, menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dibandingkan kajian-kajian sebelumnya yang lebih terfokus pada aspek administratif dan teknis belaka.

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan saran praktis dan akademis. Secara praktis, pemerintah daerah dan Kementerian Agama perlu meningkatkan koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan PPDB, meminimalisir dualisme zonasi, dan menyusun panduan operasional yang menghormati otonomi madrasah. Bagi penyelenggara pendidikan, investasi infrastruktur digital dan pelatihan SDM, perancangan mekanisme seleksi yang lebih holistik (melampaui aspek kognitif keagamaan), serta sosialisasi inklusif melalui jaringan komunitas keagamaan menjadi langkah krusial. Di tingkat sekolah, penguatan sistem pengaduan yang responsif diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi secara komparatif-regional, melakukan penelitian longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang, mengembangkan instrumen penilaian karakter keislaman yang terdigitalisasi, serta mengeksplorasi dinamika politik-ekonomi yang memengaruhi kebijakan rekrutmen di lembaga pendidikan Islam.

REFERENSI

- Permana, M. A., Zahroh, I., & Uriawan, W. (2025). *Implementasi penerimaan peserta didik baru berbasis website di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung*. MUDIR: Jurnal Manajemen Pendidikan, 7(1), 60–66.
- Permana, W. A. (2020). *Manajemen rekrutmen peserta didik dalam meningkatkan mutu lulusan*. Jurnal Islamic Education Manajemen, 5(1), 83–96.
- Supriyanto, D., & Hidayatullah, D. (2024). *Strategi rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Al Ma'soem Jatinangor Sumedang*. SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa, 2(1), 34–47.
- Azzahra, L., & Hidayat, W. (2024). *Strategi risiko dalam rekrutmen peserta didik baru di Kidsville School Bandung*. IHTIROM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 13–27.
- Khodijah, S. (2025). *Evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kota Bandung (Studi kasus pada PPDB di Kecamatan Sukajadi)*. Jurnal Media Administrasi Terapan (JMAT), 5(2), 90–96.
- Astuti, W., & Permana, A. (2023). *Manajemen penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hidayat, E. R., Rajaba, A. N., Asy-Syifaa, S., & Nazwa, A. N. (2024). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada SMP Negeri 12 Bandung. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(4), 239–253.
- Khodijah, S. (2025). Evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kota Bandung (studi kasus pada PPDB di Kecamatan Sukajadi). *Jurnal Media Administrasi Terapan (JMAT)*, 5(2), 90–96.
- Permana, M. A., Zahroh, I., & Uriawan, W. (2025). Implementasi penerimaan peserta didik baru berbasis website di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. *MUDIR: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1).

- Salisah, S. K., Darmiyanti, A., & Arifudin, Y. F. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Era Digital: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 5 (2), 1–7.
- Arischa, K. L., & Frinaldi, A. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). *Jurnal Tanah Pilih*, 3 (1), 1–8.
- Pangetu, S. P., Sumaryana, A., & Sukarno, D. (2025). Implementasi Kebijakan PPDB Tingkat SMA Negeri di Jawa Barat dalam Perspektif Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14 (3), 1–18.